

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara adalah organisasi tertinggi di wilayah tertentu yang memiliki sekelompok masyarakat di dalamnya yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan secara bersama mengatasnamakan masyarakat dan mempunyai cita-cita untuk bersatu. Sebuah negara juga harus memiliki pemerintahan yang berdaulat, memiliki peraturan yang berdasarkan sistem hukum yang diakui oleh negara lainnya.

Adapun disini masalah yang dihadapi di berbagai negara adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dengan menggunakan berbagai kebijakan, seperti peningkatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pembangunan jembatan, pasar dan sarana lainnya, dan tidak kalah pentingnya adalah di dalam sektor pembangunan SDM melalui peningkatan sektor pendidikan dan peningkatan di sektor Kesehatan.

Namun demikian kendala utama yang dihadapi hampir semuanya sama, yang umumnya bersumber pada permasalahan kependudukan. Mulai dari masih tingginya jumlah ibu melahirkan, rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak reproduksi serta masih cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk, yang tidak sebanding dengan daya dukung lingkungan yang dapat mengakibatkan penumpukan penduduk. Namun pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan program Keluarga Berencana (KB) guna peningkatan kesejahteraan keluarga

melalui pendewasaan usia perkawinan, pembinaan ketahanan keluarga, pengaturan kelahiran, untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Akan tetapi dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keluarga berencana, masih banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap program pemerintah tersebut, selain itu juga partisipasi masyarakat yang kurang keikutsertaannya dalam pembangunan program ini dan rendahnya tingkat pendidikan membuat jalan dari suatu kebijakan ini menjadi terhambat. Pemerintah membuat pelaksanaan Program KB (Keluarga Berencana) tertuang dalam Perundang – Undangan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjelaskan bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada keseluruhan dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Pemerintah Indonesia terus melakukan perubahan cara demi terwujudnya pemerataan program KB tersebut. Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam mewujudkan agenda prioritas pembangunan (Nawacita) periode 2015-2019, maka dibuatnya kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB), sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara pemerintahan Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada huruf N (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana). Dimana pembagian urusan pengendalian penduduk diatur sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat meliputi:
 - a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.
 - b. Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional.
2. Pemerintah provinsi meliputi:
 - a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
 - b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi sedangkan
3. Pemerintah daerah meliputi:
 - a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
 - b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota.

Melalui program KB ini nantinya diharapkan dalam pelaksanaan program KKBPk dan program pembangunan lainnya dapat berjalan bersamaan. Dalam Hal ini sesuai amanat yang tertuang dalam agenda prioritas pembangunan terutama

agenda prioritas ke-3 yaitu: memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka Negara kesatuan. Oleh karena itu apabila pembangunan kependudukan dimulai dari wilayah pinggiran yaitu di dusun, karena dusun merupakan cikal bakal terbentuknya desa, dan apabila pembangunan pada seluruh dusun maju, maka desapun akan maju, apabila seluruh desa maju maka sudah tentu Negara akan maju.

Untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang tidak merata di kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah melakukan kebijakan kependudukan yang tercermin dalam program pemerintah dalam berbagai bidang salah satunya adalah program keluarga berencana (KB) yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Timor Tengah Utara adalah mengarahkan dan memotivasi pasangan usia subur (PUS) menjadi akseptor KB. Jumlah akseptor KB di TTU sesungguhnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah akseptor aktif KB Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2022 sebanyak 22.146 akseptor dengan tingkat presentase akseptor aktif KB terhadap PUS sebesar 63,38% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 23.615 akseptor dengan tingkat presentase akseptor aktif KB terhadap PUS sebesar 70,32%. (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana kabupaten Timor Tengah Utara dalam angka 2023).

Berikut ini adalah daftar jumlah peserta KB aktif pasangan usia subur setiapdesa di Kecamatan Biboki utara dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
 Persentase Pencapaian Peserta KB Aktif Pada Pasangan Usia Subur (PUS)
 Di Puskesmas Lurasik Kecamatan Biboki Utara
 Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020

No	Desa	Jlh Pasangan Usia Subur	Metode Kontrasepsi							Jmlh
			Kondom	Pil	Suntik	Implant	IUD	MOW	MOP	
1	Sapaen	74	0	4	9	46	2	2	0	63
2	Taunbaen	74	0	1	13	20	1	6	0	41
3	Tualene	266	0	4	26	80	7	16	0	133
4	Biloe	176	0	1	13	40	0	12	0	66
5	Hauteas	143	1	1	6	28	26	3	0	64
6	Boronubaen Timur	97	0	0	5	35	5	1	0	46
7	Lokomea	134	0	1	16	36	3	9	0	65
8	Boronubaen	198	0	0	0	46	10	4	0	60
9	Hauteas Barat	89	0	3	11	29	5	1	0	49
10	Taunbaen Timur	88	0	4	8	25	4	6	0	47
		1339	1	19	107	316	63	51	0	604

Sumber : Profil Puskemas Lurasik 2020

Berdasarkan tabel 1.1 di atas diketahui bahwa peserta KB Pasangan usia subur di Kecamatan Biboki Utara mempunyai jumlah pasangan usia subur sebanyak 1339 sedangkan metode kontrasepsi implant masih menjadi pilihan terbanyak yaitu 316, metode kontrasepsi suntik sebanyak 107, metode kontrasepsi IUD sebanyak 63, metode kontrasepsi Mow sebanyak 51, metode kontrasepsi pil sebanyak 19, metode kontrasepsi Kondom 1 dan metode kontrasepsi mop tidak ada peminat. Data tersebut menunjukkan bahwa program Kb implant dan suntik cukup diterima dimasyarakat, akan tetapi kb mop dan kondom termasuk dalam kontrasepsi yang kurang diminati oleh masyarakat di biboki utara. Oleh karan itu, pemerintah yang menangani program KB tersebut harus semakin tegas lagi dalam memberikan sosialisasi atau menginformasikan kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Biboki Utara untuk mengikuti program KB tersebut.

Tabel 1.2
 Persentase Pencapaian Peserta KB Aktif Pada Pasangan Usia Subur (PUS)
 Di Puskesmas Lurasik Kecamatan Biboki Utara
 Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021

No	Desa	Jlh Pasangan Usia Subur	Metode Kontrasepsi							Jmlh
			Kondom	Pil	Suntik	Implant	IUD	MOW	MOP	
1	Sapaen	97	0	6	9	52	2	5	1	75
2	Taunbaen	98	0	4	16	29	4	6	0	59
3	Tualene	336	0	8	28	90	7	16	0	149
4	Biloe	204	0	3	19	45	1	12	0	80
5	Hauteas	159	5	2	7	30	26	3	0	73
6	Boronubaen Timur	141	0	0	8	40	5	6	2	61
7	Lokomea	150	0	8	19	39	3	14	3	86
8	Boronubaen	202	0	1	1	48	10	4	0	65
9	Hauteas Barat	102	1	4	11	31	5	8	0	60
10	Taunbaen Timur	137	0	4	12	27	4	6	0	53
		1626	6	40	130	431	67	80	6	760

Sumber : Puskesmas Lurasik 2021

Berdasarkan tabel 1.2 di atas diketahui bahwa peserta KB Pasangan usia subur di Kecamatan Biboki Utara mempunyai jumlah pasangan usia subur sebanyak 1626 sedangkan metode kontrasepsi implant masih menjadi pilihan terbanyak yaitu 431, metode kontrasepsi suntik sebanyak 130, metode kontrasepsi IUD sebanyak 67, metode kontrasepsi mow sebanyak 80, metode kontrasepsi pil sebanyak 43, metode kontrasepsi kondom 6 dan metode kontrasepsi mop 6 peminat. Dan metode kontrasepsi kondom dan mop mengalami peningkatan, pada tahun 2020 metode kontrasepsi kondom hanya 1 peminat dan mop tidak ada peminat dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan jumlah pemakai kondom menjadi 6 dan mop menjadi 6. Oleh karena itu, pemerintah yang menangani program KB tersebut harus mempertahankan lagi dalam memberikan sosialisasi

atau menginformasikan kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Biboki Utara untuk mengikuti program KB tersebut.

Tabel 1.3
 Persentase Pencapaian Peserta KB Aktif Pada Pasangan Usia Subur (PUS)
 Di Puskesmas Lurasik Kecamatan Biboki Utara
 Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022

No	Desa	Jlh Pasangan Usia Subur	Metode Kontrasepsi							Jmlh
			Kondom	Pil	Suntik	Implant	IUD	MOW	MOP	
1	Boronubaen	73	0	0	5	46	10	4	0	65
2	Boro Timur	74	0	0	5	34	5	1	0	45
3	Hauteas	263	1	1	6	28	25	3	0	64
4	Tualene	174	0	4	26	80	7	15	0	132
5	Biloe	144	5	1	13	40		12	0	71
6	Taunbaen	96	0	1	13	20	1	6	0	41
7	Sapaen	134	0	4	9	17	2	2	0	34
8	Lokomea	186	0	1	16	36	3	3	0	59
9	Taunbaen Timur	89	0	4	8	25	3	6	0	46
10	Hauteas Barat	86	0	3	11	29	5	1	0	49
		1319	6	19	112	352	61	53	0	603

Sumber : Puskesmas Lurasik 2022

Berdasarkan tabel 1.2 di atas diketahui bahwa peserta KB Pasangan usia subur di Kecamatan Biboki Utara mempunyai jumlah pasangan usia subur sebanyak 1319 sedangkan metode kontrasepsi implant masih menjadi pilihan terbanyak yaitu 352, metode kontrasepsi suntik sebanyak 112, metode kontrasepsi IUD sebanyak 61, metode kontrasepsi mow sebanyak 53, metode kontrasepsi pil sebanyak 19, metode kontrasepsi kondom 6 dan metode kontrasepsi mop tidak ada peminat. Dari data di atas metode kontrasepsi tahun 2022 mengalami penurunan drastis. oleh karena itu, pemerintah yang menangani program KB tersebut harus semakin tegas lagi dalam memberikan sosialisasi atau menginformasikan kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Biboki Utara untuk mengikuti program KB tersebut.

Berdasarkan ketiga tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah pasangan usia subur di Puskesmas Lurasik cenderung tidak stabil dimana pada tahun 2020 berjumlah 604 , pada tahun 2021 meningkat menjadi 760 sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 603. Hal ini sebanding dengan angka pasangan usia subur yang mengikuti program KB di Puskesmas Lurasik. Dimana berdasarkan data pada tabel 1.1 jumlah pasangan usia subur yang mengikuti KB berjumlah 1336, pada tabel 1.2 berjumlah 2336 sedangkan tabel 1.3 mengalami penurunan menjadi 1319.maka dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwa jumlah pasangan usia subur dan program KB di Puskesmas Lurasik Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara kurang maksimal, jadi pemerintah yang menangani program KB tersebut harus lebih giat dan tegas dalam memberikan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami pentingnya program KB di Kecamatan Biboki Utara.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan menghubungkan bagaimana penerapan keluarga Berencana di puskesmas Lurasik Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara. Maka penulis mengangkat suatu judul penelitian yaitu **“IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DI PUSKESMAS LURASIK KECAMATAN BIBOKI UTARA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yakni:
Bagaimanakah Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) di Puskesmas
Lurasik Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini
adalah Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Keluarga
Berencana (KB) Di Puskesmas Lurasik Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta
pengembangan teori dan konsep dalam konteks implementasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa program
keluarga berencana dapat mengurangi tingkat ekonomi keluarga dan
memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.

b. Untuk pengembangan pengetahuan ilmu administrasi kepada peneliti
sebagai upaya memperbaiki proses implementasi keluarga berencana untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

c. Sebagai bahan referensi atau rujukan peneliti yang akan datang